

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Abdulkadir, Prof, SH, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Muhammad Abdulkadir, Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Purwosutjipto HMN, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 3 (Hukum Pengangkutan), Djambatan, Jakarta, 1991.
- Soedjono Wiwoho, SH, Hukum Laut khusus tentang Pengangkutan Barang di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soemitro Ronny Hanitijo, SH, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1990.
- Undang – Undang No 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 11 tahun 1988 tentang Usaha Angkutan Penyeberangan
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 27 tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 58 tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan.
- Keputusan Menteri Perhubungan No. SK. 117/M/1970 tentang mengenai Ketentuan – Ketentuan tentang Penggunaan Perairan Pedalaman untuk Angkutan Umum dan Angkutan Barang Khusus.
- Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK /234/U/1970 tentang mengenai Pelayaran Sungai-sungai , Perairan Pedalaman termasuk Pelayaran Danau dan Pelayaran dengan menggunakan Ferry dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Subekti R, Prof, SH dan Tjitrosudibio S. HR, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, PT. Pradnya Paramita.